



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	4
1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
1.6 ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.3 METODE PENGUKURAN	10
2.4 TARGET KINERJA TAHUN INI BERDASARKAN RENSTRA.....	11
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	13
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	13
3.2 SARANA DAN PRASARANA	14
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	14
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	16
4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	16
4.2 REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022	30
4.3 CAPAIAN KINERJA PAKET PEMBIAYAAN PROYEK KPBU DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022	34
4.4 REKOMENDASI ATAS LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN.....	35
4.5 PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2022.....	37
4.6 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TAHUN ANGGARAN 2022	37
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 KESIMPULAN	39
5.2 REKOMENDASI.....	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat PPIJJ mempunyai sasaran kegiatan organisasi. Masing-masing sasaran kegiatan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya yang dinilai setiap tahun. Sasaran Kegiatan Direktorat PPIJJ untuk tahun 2022 berdasarkan 4 (empat) klasifikasi rincian output, yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Kemitraan;
3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; dan
4. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat PPIJJ Tahun 2022, berikut indikator pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ di Tahun 2022:

Tabel 1. Target Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2022

No	Klasifikasi Rincian Output	Target Renstra 2020-2024	Target PK 2022
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7 Rekomendasi Kebijakan	17 Rekomendasi Kebijakan
2	Kemitraan	10 Kesepakatan	7 Kesepakatan
3	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	1 NSPK
4	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4 Laporan	9 Laporan

Sumber Data: Rencana Kerja Dit. PPIJJ TA. 2022 dan Perjanjian Kinerja Direktur PPIJJ Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Periode 2020-2024 dengan capaian yang tertuang pada Perjanjian Kinerja TA. 2022. Strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai capaian target Tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*).
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran serta penyelesaian regulasi yang terkait dengan tugas Direktorat PPIJJ.
5. Menyusun SOP untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Azas akuntabilitas yang mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Salah satu bentuk Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2022 dibuat dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian atas rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2022 juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri PAN RB atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPIJJ terdiri dari sub direktorat dan sub bagian sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, diantaranya:

A. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

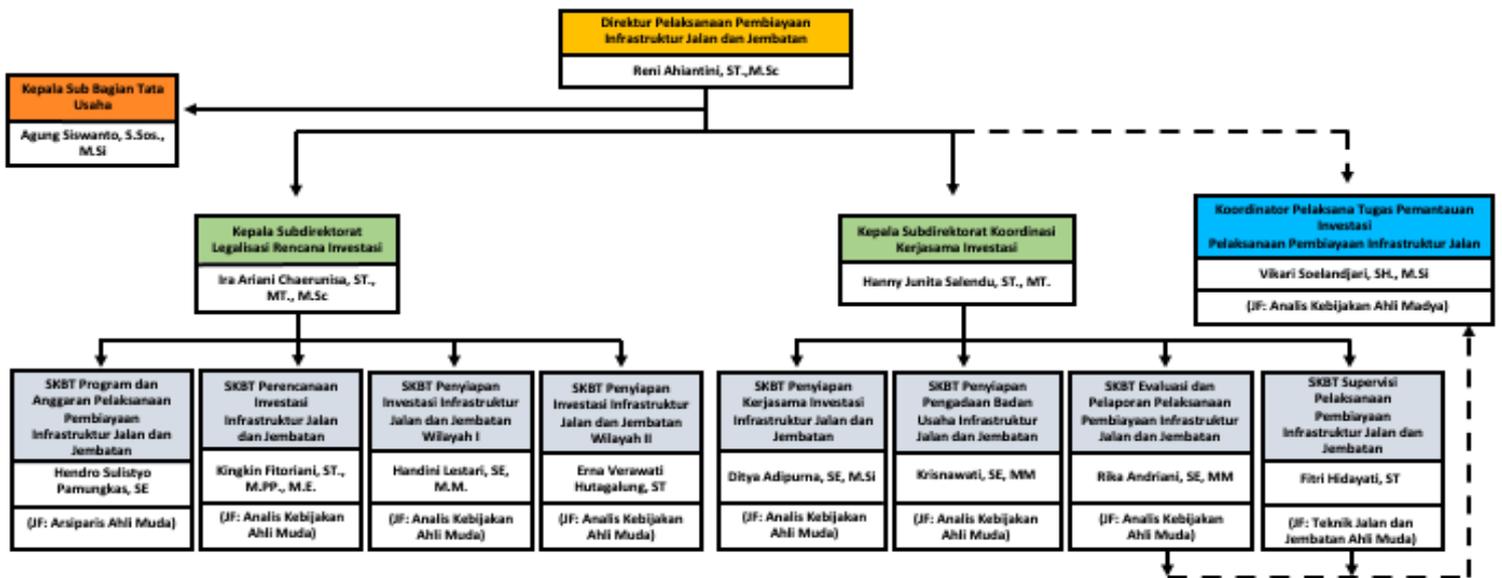
B. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan dan Peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Meningkatkan kontribusi pembiayaan jalan dan jembatan dalam mendukung pencapaian Visium PUPR;

4. Meningkatkan pengembangan skema dan sumber pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Meningkatkan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai tujuan dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja yaitu:

- a) **Sasaran Kegiatan** dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- b) **Indikator Kinerja** merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 2. Jumlah kesepakatan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 3. Jumlah NSPK pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 4. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mempertajam capaian sasaran (*output*) dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, kegiatan pokok pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kegiatan teknis yang

dilaksanakan unit kerja setingkat eselon III dalam organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut.

Secara garis besar, sasaran kegiatan pokok di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri dari:

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Tersedianya dokumen penyiapan Kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Tersedianya dokumen penyiapan dukungan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Tersedianya dokumen penyiapan transaksi dan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Tersedianya paket pembiayaan pelaksanaan transaksi dan pendampingan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

1.6 ISU STRATEGIS

Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mendorong Pemerintah untuk lebih inovatif dalam menemukan sumber pembiayaan lainnya. KPBU diharapkan dapat menjadi solusi keterbatasan fiskal Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan utamanya dari segi pembiayaan. Pemerintah dapat memaksimalkan potensi Badan Usaha untuk ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur dengan berbagi tanggung jawab dan risiko. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi tonggak baru paradigma KPBU. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah berupaya untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha agar mau berpartisipasi dalam membangun infrastruktur melalui KPBU. Adapun pengembangan KPBU Proyek Jalan dan Jembatan diselaraskan dengan arahan Presiden dalam pembangunan

infrastruktur, yaitu konektivitas infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat seperti; Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri kecil, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

Beberapa potensi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan diantaranya:

1. Target penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang tinggi ditengah keterbatasan APBN, sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan proyek melalui pendanaan inovatif non APBN;
2. Tingginya komitmen Pemerintah untuk mulai mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang berasal dari Non APBN;
3. Pelaksanaan Proyek KPBU selama lima tahun terakhir masih didominasi sektor Jalan Tol. Sedangkan *gap* capaian sektor di luar jalan tol masih cukup besar, misalnya pada pembangunan jalan baru, jembatan, dan flyover yang lebih sering memanfaatkan skema KPBU *Availability Payment*.
4. Adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Tahun 2024 yang memerlukan partisipasi dari pihak swasta dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.

Beberapa permasalahan krusial dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan adalah:

1. Proses penyiapan dan transaksi untuk penyelenggaraan proyek jalan tol membutuhkan relatif panjang;
2. Belum teratasinya pemenuhan biaya kebutuhan lahan untuk proyek-proyek yang bukan prioritas nasional sektor jalan dan jembatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/pemangku kepentingan khususnya dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan;
4. Badan Usaha Pelaksana KPBU saat ini didominasi oleh BUMN; serta
5. Perlunya jaminan terhadap kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang akan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 telah melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 2.650 km, jembatan baru sepanjang 29.859 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 1.298 km. Di masa mendatang pada periode tahun 2020-2024, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km, jembatan baru sepanjang 60.000 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sulit jika hanya mengandalkan pendanaan dari APBN saja. Negara tidak mampu mendanai pembangunan infrastruktur sepenuhnya, meski sudah mengalihkan anggaran subsidi. Pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur jalan dan jembatan memerlukan sinergi dan dukungan dari BUMN maupun peran swasta, salah satunya adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dalam hal ini adalah sektor jalan dan jembatan, untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek KPBU (PJPK) yang dipegang oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Untuk mendukung usaha tersebut, ditetapkan strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan, infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
2. Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
3. Target proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020-2024, diantaranya: pembangunan direncanakan sepanjang 3000 km jalan baru dan 60.000 m jembatan baru. Selain itu, Kementerian PUPR juga ditargetkan akan menambah jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km di tahun 2020-2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tujuan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkannya Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 memiliki sasaran program meningkatnya

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Wujud kegiatan dari sasaran program tersebut yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja adalah penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahuinya capaian kinerja, maka faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan dapat dianalisis, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan maupun kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Metode pengukuran kinerja Direktorat PPIJJ adalah Metode Analisa Data Kuantitatif, yaitu dengan membandingkan hasil pencapaian output akhir kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat PPIJJ. Berikut tabel satuan indikator sasaran Direktorat PPIJJ adalah:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot
Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50.00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50%
					Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50%
			Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	40%
					Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	60%
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
			NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	15%	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50.00%	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	60%
					Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	40%
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
			Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%

Selain indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja (Renja) di atas, Direktorat PPIJJ diamanatkan untuk memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan output kegiatan Tahun Anggaran 2022, yaitu dengan pelibatan perempuan sebagai pelaksana kegiatan maupun peserta.

2.4 TARGET KINERJA TAHUN INI BERDASARKAN RENSTRA

Target kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020-2024 menurut Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasar Perencanaan

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	1,991,581	383,920	382,472	394,183	4,696,394
PROGRAM/	SASARAN SIRA TEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA					ANGGARAN (Rp. Miliar)						
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	50,244	160,000	172,870	180,158	183,372	746,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUI Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	3	3	17	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBUI Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ didukung oleh orang 56 pegawai yang terdiri pegawai 19 laki-laki dan 24 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	32
2.	Honorar	8
3.	KI	13
Total		54

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol III	25
2.	Gol IV	7
Total		32

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	22
2.	Strata 1 (S1)	31
Total		54

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sarana dan Parasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1.	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	buah
2.	3050104005	Filing Cabinet Besi	7	buah
3.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	5	buah
4.	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	buah
5.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	buah
6.	3050201002	Meja Kerja Kayu	34	buah
7.	3050201008	Meja Rapat	1	buah
8.	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	42	buah
9.	3050206002	Televisi	2	buah
10.	3100102001	P.C Unit	21	buah
11.	3100102003	Note Book	5	buah
12.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	buah
13.	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	buah

Sumber: Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Alokasi Anggaran kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033 dan *loan* digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Mengacu pada DIPA Revisi ke-8 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2022 tanggal 15 Desember 2022, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 71.126.252.000,-

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi melalui sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara periodik dilaporkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas mengenai capaian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilaporkan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan merupakan realisasi kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Berikut ini uraian Struktur Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2022:

Tabel 4.1 Struktur Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	100%	100%	
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1	50%	50%	
				Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Lingkar Kota Kotamobagu	0	50%		
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen OBC Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%	100%	
				Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jembatan	1	25%		
				Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jalan	1	25%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
				<i>Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development</i>	1	25%		
			Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	50%	100%	
				Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	50%		
			NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan NSPK Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	100%	100%	
				Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	16,7%		
				Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
			Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1	16,7%	100%	25%
				Pengembangan Pelaksanaan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	16,7%		
				Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1	16,7%		
				Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan Non Tol	1	16,7%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
				Fasilitasi Pengadaan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	0	16,7%		
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha Sektor Jalan	1	11,1%	100%	
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jalan Tol	1	11,1%		
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jalan Non Tol	1	11,1%		
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan	1	11,1%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
				Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jembatan				
				Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Jawa dan Bali	1	11,1%		
				Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Sumatera dan Sulawesi	1	11,1%		
				Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol	1	11,1%		
				Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jembatan	1	11,1%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
				Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	11,1%		

Sumber: Renja Dit. PPIJJ Tahun 2022

Mengacu pada Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Terdapat perbedaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibandingkan target yang tertuang pada Renstra. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sesuai arahan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk mempercepat pengusahaan Proyek Jalan Lingkar Kotamobagu dan untuk membantu proses penyiapan dokumen penyiapan Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai PJPK Proyek KPBU, maka melalui revisi DIPA keempat ditambahkan paket kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Lingkar Kota Kotamobagu dan Fasilitasi Pengadaan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.
- b. Mengacu pada PMK Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022. Pagu kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dibatasi menjadi Rp 240.000.000,- hal ini berdampak pada struktur kegiatan maupun

penganggaran yang telah disusun sebelumnya pada Dokumen Rencana Kinerja TA. 2022. Untuk mengatasi hal tersebut, paket kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang semula tertera pada Dokumen Rencana Strategis sebesar 4 (empat) kegiatan dipecah menjadi 9 (sembilan) kegiatan.

Dengan kondisi tersebut diatas, kinerja yang dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
1.	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	1	Renja dan Dokumen Penganggaran
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1	1	KPBU IKN
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Lingkar Kota Kotamobagu	0	1	SP Jalan Lingkar Kotamobagu

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen OBC Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	1	AMDAL OM Jembatan Suramadu Bundling SERR
		Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jembatan	1	1	DPPT OM Jembatan Suramadu Bundling SERR
		Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jalan	1	1	Jalan Akses Exit Toll (FBC & Basic Design)
		<i>Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development</i>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tol Cilacap- Yogyakarta - Jalan Tol Demak-Tuban - Jalan Tol Ngawi-Babat - Jalan Tol Jember- Lumajang - Jalan Tol Jember- Situbondo - Jalan Tol Tulungagung Kepanjen - Jemb. Pulau Laut-Tn. Bumbu

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
					<ul style="list-style-type: none"> - Jemb. Muna-Buton - Jalan Tol Tuban-Gresik
	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	1	Studi Pendahuluan Sektor Jalan Tol
		Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	1	KA Andal Jalan Akses Exit Toll
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan NSPK Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi PP Jalan Tol - Revisi Perpres JTTS
		Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - OM Jemb. Suramadu - Jalan Trans Papua

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1	1	- Jemb. Batam-Bintan
		Pengembangan Pelaksanaan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	1	- Dok. Pengembangan Pelaksanaan Penyiapan Pengadaan BUP
		Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1	1	- Jalan Tol Kediri-Tulungagung - Jalan Tol Malang-Kepanjen

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
		Sektor Jalan dan Jembatan			
		Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan Non Tol	1	1	- Jalan Trans Papua
		Fasilitasi Pengadaan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	0	1	- Jalan Tol Ngawi-Babat
		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jembatan	1	1	- Dokumen PE Proyek KPBU Sektor Jembatan
		Evaluasi Manfaat dan Dampak dari			- Dokumen Evaluasi Manfaat dan Dampak dari

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
		Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Jawa dan Bali	1	1	Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Jawa dan Bali
		Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Sumatera dan Sulawesi	1	1	- Dokumen Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Sumatera dan Sulawesi
		Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol	1	1	- Dokumen Supervisi Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol
		Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jembatan	1	1	- Dokumen Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jembatan

NO	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI	OUTPUT (DOKUMEN)
		Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	1	- Laporan Kinerja Dit. PPIJ

4.2 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Mengacu pada DIPA Revisi ke-8 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2022 tanggal 15 Desember 2022, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 71.126.252.000,-. Berdasarkan data e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 2 Januari 2023, realisasi keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 63.077.354.255,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 88,68% dan capaian fisik sebesar 89%.

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

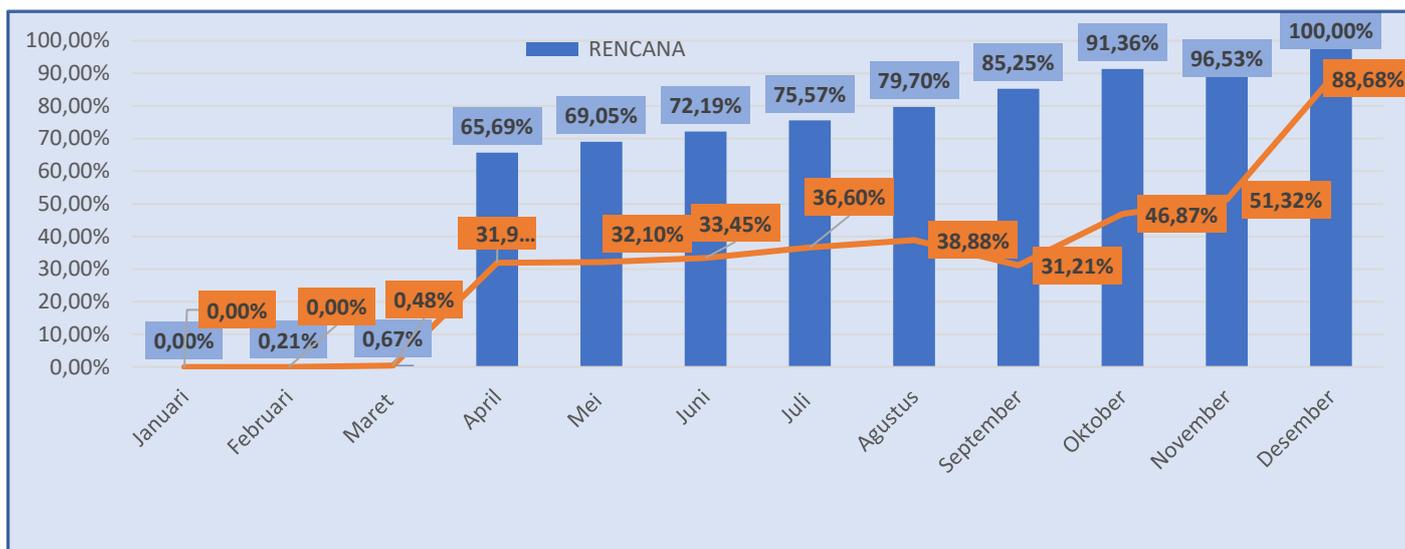
(dalam ribuan rupiah)

Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	TA 2022			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	71.126.252	63.077.354	100,00	88,68	100,00	89,00
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi						
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.079.245	1.072.775	100,00	99,40	100,00	99,00
Penanganan Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Lingkungan Dit. PPIJJ	379.613	320.336	100,00	84,39	100,00	84,00
Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1.444.000	1.374.285	100,00	95,17	100,00	95,00
Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Lingkar Kota Kotamobagu	506.512	506.499	100,00	100,00	100,00	100,00
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.395.270	1.395.270	100,00	100,00	100,00	100,00

Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	TA 2022			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan	1.999.436	1.999.435	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jembatan	2.305.276	2.305.275	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development</i>	52.187.217	44.385.378	100,00	85,05	100,00	85,00
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.005.872	1.000.762	100,00	99,49	100,00	99,00
Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.473.433	1.473.356	100,00	100,00	100,00	100,00
Subdirektorat Koordinasi Rencana Investasi						
Kemitraan						
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjakamkan						
Pelaksanaan Market Sounding Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	663.669	661.433	100,00	99,66	100,00	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	821.473	821.412	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengembangan Pelaksanaan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	738.545	736.059	100,00	94,37	100,00	95,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1.116.713	1.110.111	100,00	99,41	100,00	99,00
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan Non Tol	643.870	642.869	100,00	99,84	100,00	100,00
Fasilitasi Pengadaan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	614.800	614.708	100,00	100,00	100,00	100,00

Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	TA 2022			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	948.255	870.817	100,00	91,83	100,00	92,00
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha Sektor Jalan	238.170	237.870	100,00	99,87	100,00	100,00
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jalan Tol	236.595	236.426	100,00	99,93	100,00	100,00
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jalan Non Tol	180.111	175.948	100,00	97,69	100,00	98,00
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Proyek KPBU Sektor Jembatan	180.989	179.791	100,00	99,34	100,00	99,00
Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Jawa dan Bali	222.364	219.083	100,00	98,52	100,00	99,00
Evaluasi Manfaat dan Dampak dari Beroperasinya Infrastruktur KPBU Jalan dan Jembatan Wilayah Sumatera dan Sulawesi	235.649	235.505	100,00	99,94	100,00	100,00
Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jalan Non Tol	224.854	220.226	100,00	97,94	100,00	98,00
Supervisi atas Implementasi Aspek Pembiayaan pada Proyek Infrastruktur KPBU Sektor Jembatan	134.811	132.483	100,00	98,27	100,00	98,00
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	149.510	149.230	100,00	99,81	100,00	100,00

Sumber: e-monitoring PUPR



Gambar 4.1 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan

4.3 CAPAIAN KINERJA PAKET PEMBIAYAAN PROYEK KPBU DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pelaksanaan tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dalam bentuk Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Jumlah Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan. Adapun untuk proyek KPBU dengan skema pengembalian tarif (sektor Jalan Tol), Direktorat PPIJJ berwenang untuk menyiapkan dokumen perencanaan hingga tahap transaksi. Selanjutnya kewenangan untuk melaksanakan pelelangan berpindah ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan paket pembiayaan KPBU di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dikoordinasi oleh Direktorat Strategi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan. Capaian dihitung atas progres pengusahaan proyek KPBU yang sudah memasuki tahap transaksi. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan

TARGET RENSTRA TA. 2022		REALISASI		
JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)
10	75.598.391.000.000	10		181.173.480.000.000
			Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim	3.526.000.000.000
			Jalan Akses Exit Toll	7.900.000.000.000
			Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta	53.770.000.000.000
			Jalan Tol Demak – Tuban	56.580.000.000.000
			Jalan Tol Ngawi – Babat	18.620.000.000.000
			Jalan Tol Jember – Lumajang	7.400.000.000.000

		Jalan Tol Jember – Situbondo	10.290.000.000.000
		Jalan Tol Tulungagung – Kapanjen	14.520.000.000.000
		Jembatan Muna – Buton	8.300.000.000.000
		Jembatan Tanah Bumbu – Pulau Laut	2.460.000.000.000

4.4 REKOMENDASI ATAS LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Evaluasi Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan sebagai perwujudan dari amanah yang tertuang dalam Permen PAN/RB Tahun 2021. Evaluasi Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Eselon II dilaksanakan pada Bulan Februari 2022. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman bertindak sebagai Evaluator Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Adapun Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendapatkan penilaian Sangat Baik dengan perolehan nilai 78,93%. Naik dari perolehan pada Tahun 2021 sebesar 77,67%. Rekomendasi dari Evaluatan atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan antara lain:

Tabel 4.4 Rekomendasi dari Evaluatan atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO.	KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
1	Perencanaan Kinerja	Menyusun SOP atau Pedoman terkait reviu renstra.
		Perencanaan kinerja pada unit kerja belum sepenuhnya dijabarkan pada dokumen penganggaran.
		Menerapkan reward and punishment pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.
2	Pengukuran Kinerja	Menyusun pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut.
		Sistem aplikasi pemantauan kinerja yang digunakan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja unit kerja.
		Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment.

		Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja.
3	Pelaporan Kinerja	Informasi dalam laporan kinerja harus berisi capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan dilengkapi dengan analisa keberhasilan maupun kegagalannya, sehingga apabila terjadi kegagalan, dapat menjadi tindak lanjut atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
		Belum adanya perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan capaian kinerja tahun berjalan.
		Target dalam perhitungan cascading yang ada di laporan kinerja tidak sesuai dengan target yang ada di Renstra.
		Capaian kinerja dalam laporan kinerja tidak di dukung oleh bukti-bukti terkait capaian kinerja.

4.5 PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2022

Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada TA. 2022 mengalami 4 (empat) kali perubahan sehingga terdapat 8 (delapan) dokumen perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada tahun 2022.

Perjanjian kinerja awal diterbitkan pada Januari 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.525.708.000,-. Revisi perjanjian kinerja terakhir diterbitkan pada Bulan Februari 2022. Pada revisi ini terjadi penambahan anggaran menjadi Rp 72.126.252.000,-. Revisi Perjanjian Kinerja juga meliputi penambahan paket kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Lingkar Kota Kotamobagu dan Fasilitas Pengadaan Badan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan. Adapun terdapat penambahan anggaran yang signifikan dari tambahan paket kegiatan *Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development* yang bersumber dari *loan* ESP/ADB sebesar Rp 52.187.217.000,-

4.6 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Penggunaan *dashboard* KPBU sebagai alat kontrol pimpinan untuk melihat progres proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.
2. Penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep-konsep laporan dan konsep surat. Disamping itu, penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) secara optimal memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi sehingga dapat mengurangi penggunaan ATK.
3. Efisiensi pelaksanaan rapat dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan melaksanakan kegiatan rapat melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dsb.

4. Sebagai hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan melakukan optimasi anggaran dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk kebutuhan anggaran beberapa kegiatan seperti renovasi gedung, pelaksanaan kegiatan Pekan *CreatiFF*, peningkatan jaringan internet, dsb.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mengalami 8 (delapan) kali perubahan. Dilakukan juga revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang meliputi perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 2022 dan penambahan 2 (dua) paket kegiatan atas arahan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan revisi DIPA terakhir, secara keseluruhan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp 71.126.252.000,- dan realisasi penyerapan keuangan selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp 63.077.354.255,- atau 88,68%, dari target rencana 100%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 89% dengan target rencana yaitu 100%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara penuh diantaranya Pandemi COVID-19 yang belum usai, yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan mobilisasi. Selain itu Paket kegiatan kontraktual *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang bersumber dari loan ESP/ADB dengan pagu Rp 39.936.739.000,- mengalami kendala pada administrasi dan realisasi yang semula direncanakan terealisasi pada bulan Agustus. Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Disamping kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan pula efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan seperti penggunaan *Dashboard* KPBU Sektor Jalan dan Jembatan, pelaksanaan kegiatan rapat secara daring hingga efisiensi anggaran.

5.2 REKOMENDASI

1. Agar dapat mencapai target keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan setiap bulannya perlu dilakukan beberapa hal antara lain
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sehingga sesuai dengan agenda yang telah disusun.
3. Meminimalkan terjadinya optimalisasi anggaran dalam tahun berjalan.
4. Menyusun timeline kegiatan Direktorat.

5.3 Tindak Lanjut

Isu strategis yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2023, sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
2. Mempersiapkan data Reviu Perkiraan Biaya (RPB) dan progress tanah untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera
3. Melakukan finalisi Kajian Ekonomi Evaluasi Dampak di Provinsi Lampung dan Makassar
4. Menyempurnakan kegiatan supervisi berdasarkan hasil *draft* pedoman dan daftar simak
5. Menyiapkan masukan kepada Menteri PUPR terkait pilihan skema *solicited* atau *unsolicited* dalam pembangunan *immersed tunnel* di Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (IKN).
6. Melakukan perkuatan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target capaian Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
 - a. Percepatan koordinasi dengan BPJN Wamena, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Yalimo untuk memastikan titik lokasi, aspek teknis dan desain terkait penyediaan fasilitas UPPKB.

- b. Percepatan koordinasi dengan PT Gudang Garam selaku pemrakarsa Jalan Tol Kediri-Tulungagung untuk menyelesaikan penyesuaian pada kajian Studi Kelayakan.
- c. Tim Konsultan proyek Jalan Tol SERR diminta melakukan percepatan terkait perbaikan pada dokumen DPPT sesuai dengan perubahan trase yang telah disepakati
- d. Pemrakarsa proyek Jalan Tol Cikunir-Karawaci diminta melakukan percepatan terhadap *updating* dokumen keuangan.
- e. Pemrakarsa proyek Jalan Tol Semanan-Balaraja diminta melakukan percepatan terkait:
 - 1) Perubahan *stakeholder* dan calon *stakeholder* baru;
 - 2) Informasi terkait perubahan *design* dan penambahan biaya investasi;
 - 3) Berita acara terhadap penetapan lokasi;
- f. Percepatan koordinasi dengan Bina Marga terhadap *update* ketentuan *clearzone* proyek Jalan Tol Semanan-Balaraja
- g. Tim Konsultan Jalan Tol Semarang *Harbour* diminta melakukan percepatan terkait *crosscheck* dokumen pengintegrasian *polder*, tanggul laut dan jalan tol.
- h. Pemrakarsa proyek Jalan Tol Semarang *Harbour* diminta melakukan percepatan terkait penyiapan data dan informasi perusahaan yang terafiliasi dengan PT SMJ.
- i. Percepatan koordinasi dengan dengan Dit. Pinjaman dan Hibah DJPPR Kementerian Keuangan terkait pembahasan skema pembiayaan rencana penguasaan proyek Jembatan Batam-Bintan.
- j. Badan Usaha proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing diminta melakukan percepatan terkait kelengkapan kajian teknis usulan trase yang telah diajukan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama

RENI AHIANITNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

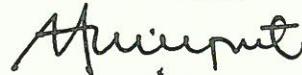
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp25.525.708.000,00

JAKARTA, JANUARI 2022

DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 JALAN DAN JEMBATAN



RENI AHIANITINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Maret 2022

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp60.701.805.000,00

JAKARTA, MARET 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHIANITINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHIANITINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

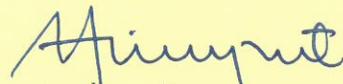
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp77.252.176.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2022

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN



RENI AHIANITINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp75.410.416.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN



RENI AHIANITINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan</i>	25%

KEGIATAN

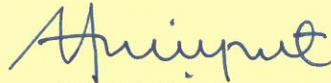
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp72.100.224.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHIANITINI



Nomor : UM.0201-Pa/05
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi
SAKIP Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Tahun 2021

Jakarta, 11 Februari 2022

Yth.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2021 dengan uraian sebagai berikut:

A. Evaluasi SAKIP berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PW 0204-Ij/04 tanggal 3 Januari 2022;

Tujuan umum evaluasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Fokus Evaluasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan meliputi evaluasi atas proses/ penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi:

No.	Komponen	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	a. Rencana Strategis Pemenuhan renstra, kualitas renstra, Implementasi renstra; b. Rencana Kinerja Tahunan (pemenuhan RKT, kualitas RKT, dan implementasi RKT). c. Penetapan Kinerja (pemenuhan PK, kualitas PK, dan implementasi PK)
2	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan Pengukuran; b. Kualitas Pengukuran; c. Implementasi Pengukuran
3	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan Pelaporan; b. Penyajian Informasi Kinerja; c. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

No.	Komponen	Sub Komponen
4	Evaluasi Internal	a. Pemenuhan Evaluasi; b. Kualitas Evaluasi; c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi.
5	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (output) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>)

- C. Berdasarkan penilaian komponen, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**, dengan nilai angka 78,93 % dengan rincian:

No.	Komponen	Bobot/ Nilai Maksimum (%)	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,09 %
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	21,43 %
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,63 %
4.	Evaluasi Internal	10,00	8,25 %
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00	11,53 %
Jumlah		100,00	78,93 %

Implementasi SAKIP pada tahun 2021 sebesar 78,93 % tersebut meningkat dari tahun 2020 sebesar 77,67 %.

- D. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

No.	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	a. Sebaiknya Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada perencanaan kinerja sehingga dapat menunjukkan adanya perbaikan atas kinerja. Akan tetapi, apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti maka perlu dijelaskan mengenai kendalanya. b. Menyusun SOP atau Pedoman terkait reuiu renstra c. Perencanaan kinerja pada unit kerja belum sepenuhnya dijabarkan pada dokumen penganggaran. d. Menerapkan <i>reward and punishment</i> pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja	a. Menyusun pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut b. Sistem aplikasi pemantauan kinerja yang digunakan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja unit kerja. c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward and punishment</i>

No.	Komponen	Rekomendasi
		d. Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	a. Informasi dalam laporan kinerja harus berisi capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dan dilengkapi dengan analisa keberhasilan maupun kegagalannya, sehingga apabila terjadi kegagalan, dapat menjadi tindak lanjut atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. b. Belum adanya perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan capaian kinerja tahun berjalan c. Target dalam perhitungan cascading yang ada di laporan kinerja tidak sesuai dengan target yang ada di Renstra d. Capaian kinerja dalam laporan kinerja tidak di dukung oleh bukti-bukti terkait capaian kinerja.
4.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Evaluasi Internal (10%)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air,**

Arvi Argyantoro

NIP.196409121991031002

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan